



PRESS RELEASE

PENUTUPAN PROGRAM DUKUNGAN IOM TERHADAP REFORMASI POLRI DENGAN PENDANAAN UNI EROPA

(2006 – 2012)

Jakarta, 11 Juli 2012

Enam tahun Program Kerjasama dan Dukungan untuk Reformasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan IOM (International Organization for Migration) akan berakhir. Program yang didanai Uni Eropa ini, untuk periode tahun 2006 - 2012 akan resmi ditutup pada tanggal 31 Juli 2012. Untuk menandai berakhirnya program ini, acara Penutupan Program akan diadakan pada tanggal 11 Juli 2012 di Jakarta.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Uni Eropa dan IOM, "Saya juga meminta agar seluruh jajaran kepolisian dari tingkat pusat sampai kewilayahan selalu berkomitmen untuk tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah terbangun melalui kerjasama yang sangat baik ini. Saya juga sangat mengharapkan agar walaupun kerjasama ini sudah berakhir, tetapi hubungan antara IOM, Uni Eropa, Pemerintah Belanda dan Polri akan terus berlanjut bahkan bila memungkinkan masih bisa membantu Polri di masa yang akan datang, karena Polri masih membutuhkan bantuan pihak luar untuk mempercepat reformasi menuju Pelayanan Prima."

Atas keberhasilan penerapan proyek kerjasama selama ini, Kepala Misi IOM, Denis Nihil berterimakasih pada Kapolri dan para Kapolda di jajarannya atas kerjasama yang baik ini, "Komitmen yang tinggi dari para petinggi Polri telah menjadikan program kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan lancar."

IOM dalam acara ini juga memaparkan pencapaian-pencapaian kegiatan dalam kerangka program kerjasama Polri dan IOM dengan pendanaan Uni Eropa untuk periode tahun 2006 – 2012.

Pencapaian utama program Dukungan untuk Reformasi Polri ini meliputi pelatihan-pelatihan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada lebih dari 100,000 anggota Polri di seluruh Indonesia, integrasi Polmas dan HAM kedalam bahan ajar Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi (Diktukbrigpol) dan dukungan pada penyusunan Peraturan-peraturan Kapolri mengenai Penerapan Perpolisian Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender.

"Dalam dekade terakhir ini, Polri telah mencapai banyak hal khususnya dalam rangka membangun kemitraan berbasis kepercayaan dengan masyarakat Indonesia dan hal ini sangat menjanjikan, meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi dalam reformasi. Menggunakan strategi RANHAM dan konsep Polmas merupakan bagian dari tonggak penting

reformasi, selain kebijakan-kebijakan di bidang kesetaraan jender telah mengalami kemajuan. Uni Eropa bangga karena bersama-sama dengan IOM dalam enam tahun terakhir telah berkontribusi pada proses transformasi yang berhasil ini baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia, yang mana sangat penting terhadap keamanan, keadilan dan stabilitas masyarakat,” kata Andreas Roettger, Kepala bidang Ekonomi dan Kerjasama Regional/Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN.

LATAR BELAKANG

Salah satu pencapaian dalam pembangunan demokrasi di Indonesia adalah berpisahnya Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tahun 1999, yang menandai pengakuan supremasi sipil dalam bidang keamanan dalam negeri. Sejak berpisah dari TNI, Polri telah berupaya untuk mereformasi dan mengadaptasi diri ke dalam norma dan harapan demokratisasi masyarakat Indonesia yang berkembang sangat pesat.

Usaha-usaha reformasi Polri tersebut meliputi tiga aspek: *struktural*, *instrumental* dan *kultural*. Secara **struktural** upaya reformasi terpusat pada pembangunan organisasi polisi yang independen, profesional, berdasarkan pada iptek yang berorientasi pada pelayanan publik. Secara **instrumental**, Polri berupaya membuat, memperbaiki dan mengharmonisasikan berbagai panduan instrumen bagi penerapan filosofi, prinsip, visi dan misi, serta kode etik perilaku bagi anggota polisi. Secara **kultural**, upaya-upaya reformasi dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja anggota polisi serta menciptakan budaya polisi yang mendukung terlaksananya reformasi struktural dan instrumental, sehingga terwujud sebuah budaya Polri yang baru.

Dalam upaya mereformasi tiga aspek ini, terutama aspek kultural, sejak tahun 2004 Polri telah bekerja sama dengan **International Organization for Migration (IOM)** untuk mempercepat terwujudnya reformasi Polri. Kerjasama Polri dan IOM yang telah memasuki tahun ke-8 (delapan) dengan pendanaan dari **Kedutaan Besar Kerajaan Belanda** dan **Uni Eropa**, rencananya akan berakhir pada 31 Juli 2012.

Dukungan dan dan kerjasama selama ini dilakukan melalui satu Program yang terdiri dari beberapa proyek di bawah program Kerjasama **IOM Police Project** atau Proyek Dukungan terhadap Reformasi Polri. Kerjasama ini dibagi kedalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- **Kerjasama Tahap I: tahun 2004 s/d 2005**, Polri dan IOM menyepakati pembentukan 3 pilot project untuk penerapan Perpolisian Masyarakat atau Pemolisian Masyarakat (**Polmas**) di Polres Situbondo (Polda Jawa Timur), Polresta Bogor (Polda Jawa Barat) dan Polresta Pontianak (Polda Kalimantan Barat).
- **Kerjasama Tahap II: tahun 2005 s/d 2009**, menambah 3 Polres/tabel, yaitu Polda Metro Jaya, Poltabes Denpasar (Polda Bali) dan Poltabes Babelang (Polda Kepulauan Riau). Pada tahun 2006, Kapolri juga meminta dukungan IOM untuk membantu mempercepat reformasi Polri di Aceh (Waktu itu Polda Nanggroe Aceh Darussalam). Di Aceh, IOM dengan pendanaan **Uni Eropa** dan **Kedutaan Besar Kerajaan Belanda** membantu reformasi Polisi di Aceh melalui proyek “Dukungan Terhadap Reformasi Polri di Aceh.”
- **Kerjasama Tahap III: Tahun 2010 s/d 2012**, dengan pendanaan **Uni Eropa**, IOM melaksanakan dua program yaitu “Dukungan terhadap Konsolidasi Reformasi Polri di Aceh” dan

implementasi “Dukungan Bagi Polri dalam rangka Pengimplemtasian Strategi Polmas dalam Konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)” untuk tingkat nasional.

Dukungan IOM kepada Polri dalam rangka mempercepat reformasi dilakukan dengan mendukung pengenalan melalui pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip dan standar Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) bagi petugas penegak hukum, serta Polmas sebagai filosofi dan strategi. Implementasi program mencakup dukungan teknis dan keahlian serta dukungan peralatan untuk membantu Polri menerapkan Polmas sebagai *grand strategy* Polri.

IOM membantu Polri dalam pelatihan Polmas dan HAM bagi lebih dari 100,000 anggota Polri di seluruh Indonesia; integrasi Polmas dan HAM ke dalam kurikulum dan materi pendidikan pembentukan brigadir polisi; monitoring dan evaluasi; penyusunan Peraturan Kapolri (Perkap 7 tahun 2008) tentang Strategi Polmas; perumusan Perkap tentang Implementasi HAM dalam tugas pokok Polri (Perkap 8 tahun 2009); perumusan Perkap tentang Kesetaraan Gender (tahun 2012) yang saat ini masih menunggu penanda-tanganan resmi oleh Kapolri; dukungan pengembangan kapasitas dan kemampuan Lembaga Pendidikan Polri; pelatihan anggota Polri mendukung perdamaian di Aceh, termasuk mendirikan 23 Pusat Pelatihan (*training center*) lengkap beserta peralatannya di Aceh pada tahun 2006-2009, dan lain-lain.

Banyak pencapaian kuantitatif dan kualitatif yang telah dibuat melalui kerjasama yang baik antara Polri dan IOM di seluruh wilayah Indonesia. Semua pihak mengharapkan kerjasama ini memang benar-benar mendukung percepatan reformasi Polri menjadi organisasi kepolisian demokratis. Namun 8 tahun telah berlalu, sudah saatnya IOM menyerah-terimakan kerjasama ini kepada Polri guna memelihara keberlanjutannya.

Acara tanggal 11 Juli 2012 ini bertujuan untuk menyampaikan pencapaian-pencapaian kerjasama selama ini, yang akan dipaparkan kepada jajaran pejabat tinggi Polri dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Besar harapan IOM dan negara-negara donor (khususnya Uni Eropa) bahwa semua capaian program tersebut dapat dilanjutkan di masa depan, dalam kerangka percepatan reformasi birokrasi Polri. Dalam acara ini juga diharapkan akan teridentifikasi para pemangku kepentingan, kalangan organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain yang dapat berkomitmen untuk turut serta membantu Polri melanjutkan proses reformasi Polri di masa yang akan datang. (*)